

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis, Pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* atau daya yang berarti kekuatan atau kapasitas. Dengan cara ini, pemberdayaan adalah suatu kerja atau siklus untuk memperoleh kekuatan, daya atau kapasitas itu dari orang-orang yang memiliki kapasitas kepada individu-individu yang tidak memilikinya. Menurut Edi Suharto (35:2003) Pemberdayaan adalah suatu cara di mana seorang individu, rakyat, organisasi dan komunikasi dikoordinasikan untuk memiliki pilihan untuk mengendalikan (memerintah) hidup mereka. Pemberdayaan adalah siklus dimana yang lemah dapat menghadapi atau mengontrol keadaan atau kondisi dalam hidupnya. Kontrol ini menggabungkan perintah atas sumber yang berbeda (yaitu fisik dan intelektual) dan menggabungkan filosofi (keyakinan, nilai, dan pemikiran). Pemberdayaan juga berarti memperluas kesadaran individu sehingga mereka mendapatkan kebutuhan akan harta sehingga dengan penguatan ini dipercaya daerah setempat akan berubah dari "korban" kemajuan menjadi "pelaku" pembangunan. Pada tahap ini, akan ada proses-proses yang harus dilalui oleh daerah ini, khususnya kaum perempuan, dalam memampukan agar otonomi di mata masyarakat dapat dipahami.

Sehingga masalah sosial di lingkungan sekitar, seperti masalah keuangan, pendidikan, bisa ditanggulangi dengan sumber daya yang ada.

Pemberdayaan wanita adalah sebuah usaha untuk mendistribusikan kekuasaan di antara wanita dan perempuan di berbagai bidang kehidupan, seperti kebebasan dasar, kebebasan politik, aspek keuangan, sosial, sosial hingga agama. Memberdayakan wanita bukan berarti menyamakan kedudukan wanita dengan pria secara utuh, melainkan memberikan bagian yang ideal kepada wanita, sehingga mereka bisa menjadi orang yang bebas atau berdaya yang dapat membuat pilihan-pilihan yang berhubungan dengan kehidupan mereka masing-masing.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Paul Freire dalam *Keban dan Lele*, pemberdayaan bergantung pada pendekatan yang disebut *conscientization*, yang merupakan proses pembelajaran untuk melihat inkonsistensi sosial, ekonomi, dan politik di mata publik. Pandangan dunia ini mendesak individu untuk mencari cara menciptakan kemandirian dari struktur-struktur yang menindas. Berawal dari kesepakatan ini, maka partisipasi masyarakat daerah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan suatu program, tetapi juga membahas nilai-nilai politik juga.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan tersebut adalah membentuk ekosistem masyarakat menjadi lebih mandiri, diantaranya kebebasan untuk berpikir, bertindak, dan mengontrol apa yang akan dilaksanakan. Kemandirian berfikir memiliki arti penting dimana suatu kondisi yang dialami masyarakat setempat ditandai dengan kemampuan memikirkan, mengambil keputusan, dan melaksanakan haknya secara utuh untuk terlibat menangani persoalan-persoalan sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa

kondisi itu bisa disebut telah mengalami kemajuan secara sosial kultur. Oleh karena itu, penting untuk mengerahkan kemampuan SDM secara maksimal dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif.

Keempat keadaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Kapasitas kognitif adalah kemampuan berpikir berdasarkan informasi dan pemahaman individu atau kelompok untuk mengamati jawaban atas masalah yang dihadapi.
- 2) Kondisi konatif adalah perilaku masyarakat yang terwujud yang ditujukan pada perilaku yang sensitif terhadap kualitas nilai kemajuan dan keberdayaan.
- 3) Kondisi afektif adalah perasaan atau *sense* yang diklaim oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap wajar untuk diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam perilaku dan cara pandang.
- 4) Terakhir, kapasitas psikomotorik adalah kemampuan yang digerakkan oleh masyarakat sebagai usaha mereka untuk membantu peningkatan aktivitas pembangunan.

Dari keempat keadaan di atas, apabila semuanya dilakukan dengan seharusnya, maka akan tercipta suatu masyarakat mandiri secara ekonomi yang mampu mengurus persoalan-persoalan sosial yang ada di mata masyarakat, khususnya kaum perempuan itu sendiri. Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk membantu dan mempercepat tercapainya keseimbangan dan kesetaraan sesama manusia.

c. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan itu tidak bersifat kekal atau selamanya, tetapi hanya sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, setelah itu dilepas untuk mandiri meski hanya diawasi dari jauh agar pemberdayaan itu tidak jatuh lagi, maka dari itu masyarakat yang menjadi sasaran objek untuk diberdayakan harus memperhatikan pemeriliharaan semangat, kondisi, hingga peningkatan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Tahapan pemberdayaan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan keterampilan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.¹

Serangkaian tahapan tersebut dapat diamati pada tabel berikut ini:

¹ Ambar T. Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hlm. 83

Tabel 2.1

**Tahapan Pemberdayaan *Knowledge, Attitudes, Practice* dengan
Pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik dan Konatif**

Tahapan Afektif	Tahapan Kognitif	Tahapan Psikomotorik	Tahapan Konatif
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki keterampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa Kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai keterampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan keterampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi	Memperkaya variasi keterampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Tabel tersebut memberikan gambaran jelas bagaimana peningkatan afeksi, kognisi, psikomotorik dan konatif dalam suatu pembangunan masyarakat. Masyarakat

berproses secara bertahap dalam waktu yang tidak singkat, terkadang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukan perubahan dari satu kondisi ke kondisi lainnya, selain itu juga membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, lama tidaknya perubahan dalam masyarakat tergantung SDA dan SDM yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

d. Sasaran Pemberdayaan

Schumacher berpandangan bahwa rakyat miskin adalah² bagian dari pemberdayaan dengan tidak menghilangkan ketimpangan struktural yang ada, mereka juga memiliki kekuatan untuk berkembang. Ada tiga pilar penting dalam pelaksanaan pemberdayaan, dan tiga pilar tersebut adalah Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut harus saling terikat serta berkesinambungan agar jalannya pemberdayaan dalam masyarakat akan terwujud dan pembangunan akan berjalan ke arah yang lebih baik (seharusnya) seperti yang diharapkan.

Pertama Pemerintah merupakan komponen pembuat kebijakan politik, dimana secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap tatanan hidup masyarakat luas. Maka peran ini memang hanya bisa di isi oleh lembaga-lembaga yang mewadahi aspirasi-aspirasi untuk tujuan membangun masyarakat. Kita tahu di Indonesia ada kementerian yang mengurus pemberdayaan, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Melalui lembaga ini, pemerintah bisa mengulurkan tangan untuk bersama-sama dengan swasta dan masyarakat melakukan pembangunan SDA dan SDM yang mumpuni. *Kedua* adalah swasta, dimana peran ini adalah bisa disebut sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, swasta ini

² *Ibid hlm. 207*

bisa berbentuk individu, bisa kelompok maupun juga organisasi. Swasta mempunyai peran untuk mengedukasi masyarakat secara langsung, karena apabila semuanya dilakukan oleh pemerintah, maka proses ini tidak akan berjalan efektif. Maka peran swasta inilah yang menjadi *katalis* atau percepatan proses menuju masyarakat yang berdaya. Dalam hal ini IBU BELLA sebagai swasta mempunyai peran demikian, dengan dibantu oleh Yayasan Pondok Pesantren TQN Suryalaya, IBU BELLA melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan pembangunan, yang memang dikhususkan untuk kaum perempuan, yang selama ini kita lihat kurang dilibatkan. Dalam hal inilah swasta (IBU BELLA) menjadi jembatan penghubung dan mempunyai peran yang cukup penting untuk melibatkan perempuan-perempuan dalam melakukan pembangunan SDA maupun SDM. *Ketiga* tentu saja masyarakat, komponen yang tidak bisa dipisahkan dari dua komponen sebelumnya, masyarakat yang sadar akan pentingnya pembangunan SDA dan SDM tentu akan bergerak secara sadar untuk melakukan sebuah perubahan, khususnya dimasyarakat sekitarnya. Masyarakat harus dilibatkan dalam melakukan proses pembangunan yang dilakukan pemerintah, apabila mereka ingin pembangunan itu berjalan efektif. Masyarakat terutama perempuan harus menjadi pelaku perubahan, bukan menjadi objek dan menjadi korban dalam pembangunan.

e. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Ada empat prinsip pemberdayaan yaitu:

1) Kesetaraan

Kesetaraan merupakan gagasan utama yang dibawa oleh prinsip pemberdayaan, kesetaraan di sini adalah kesamaan kedudukan diantara masyarakat

dan lembaga yang melakukan program pemberdayaan daerah di antara laki-laki dan perempuan. Faktanya memang ada kesamaan kesempatan yang diberikan dalam memilih profesi, kesempatan yang setara dalam mendapatkan informasi, memperoleh pengetahuan, sehingga mereka memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki tanpa menurunkan derajat wanita itu sendiri, selain itu dalam pandangan masyarakat umum juga lama-lama akan berubah kearah yang lebih baik, dimana selama ini wanita adalah individu yang dianggap lemah dan bergantung terhadap pria. Dengan tujuan agar terjadi hubungan atau keterkaitan, akan bersama-sama membangun masyarakat.

2) Partisipasi

Program pemberdayaan juga dapat menstimulasi kemandirian yang berujung pada naiknya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat, serta diawasi, direncanakan, dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Makna partisipasi dalam pembangunan disini adalah individu yang aktif dalam:

- a. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
- b. Keterlibatan dalam pengawasan
- c. Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan
- d. Partisipasi sebagai proses pemberdayaan
- e. Partisipasi bermakna kerja kemitraan

3) Keswadayaan dan Kemandirian

Kemandirian mempunyai arti menghargai serta mengedepankan kemampuan masyarakat itu sendiri daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang

miskin bukan merupakan objek yang mempunyai kemampuan, tetapi merupakan subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka juga mempunyai pengetahuan menabung, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tekad kerja keras dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama mereka patuhi. Semua itu bisa serta harus digali maka akan menjadi modal untuk proses pembangunan supaya mempercepat proses kearah masyarakat yang sejahtera.

4) Keberlanjutan

Proses pemberdayaan harus dirancang untuk berkelanjutan, meskipun pada awalnya memang pendampingan lebih dititik beratkan pada masyarakat itu sendiri, namun secara perlahan dan pasti pendampingan masyarakat akan berkurang. Maka dari itu tindakan pengawasan, pemantauan, evaluasi sangat penting dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (kaitannya dengan kemandirian) dengan tujuan supaya pemberdayaan masyarakat akan terus berkelanjutan (*Sustainable*).

2. Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren

Perjalanan lembaga pendidikan pesantren di Indonesia telah berjalan cukup panjang, sampai saat ini ajaran-ajaran pesantren masih mengakar dikalangan masyarakat bawah. Terdapat banyak jenis pesantren yang menjadikan Indonesia mempunyai banyak sudut pandang keislaman, karena setiap pesantren mempunyai ciri khas dan identitasnya masing-masing. Terkhusus untuk penelitian ini, karena *IBU BELLA* berada dibawah yayasan Pesantren Tarekat Qadariyyah Naqsabandiyyah maka kita akan sedikit bahas mengenai Tarekat ini. Tarekat Naqsabandiyyah yang didirikan oleh syekh Baha al-Din al-Naqsabandi al-Bukhari, dimana TQN ini menggabungkan konsep dan metode dzikir yang *Jahar* atau dzikir keras dan dzikir dalam hati untuk mencapai keseimbangan dan

mencapai kesucian jiwapara penganutnya. Awal mulanya terjadi perluasan ajaran islam ke luar jazirah arab antara lain ke Afrika, Asia, termasuk juga Indonesia didalamnya diwarnai dengan pendekatan akomodatif, pendekatan akomodatif berarti pendekatan dengan mempertemukan ajaran islam dengan ajaran-ajaran yang telah ada di wilayah tersebut. Pendekatan ini dilakukan oleh orang atau kaum sufi dan tarekat yang kemudian ini diminati oleh banyak orang. Ajaran tasawuf yang dibawa oleh tarekat ini mempunyai pemikiran yang dominan, maka negara Indonesia yang merupakan Negara dengan berbagai kultur didalamnya (multicultural) menerima ajaran tasawuf yang dibawa oleh kaum Sufis dan tarekat sedikit demi sedikit, dengan kultur yang berbeda tersebut tentunya setiap kepualauan yang ada di nusantara mempunyai wajah dan penghayatan sendiri dalam menjalankan agamanya.

M. Yusuf Agung Subekti dan Moh. Mansur Fauzi mengungkapkan dalam jurnalnya, ia berkata bahwa pesantren adalah sebagai salahsatu lembaga pendidikan islam yang ada di Indonesia yang mempunyai peluang untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik secara agama maupun pengetahuan umum, dengan catatan pondok pesantren mampu beradaptasi dengan globalisasi yang sedang terjadi tanpa meninggalkan watak kepesantrenannya. Edy Supriono berkata, minimal ada tiga alasan mengapa pesantren mempunyai peluang lebih besar dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain.

Pertama, karena ditempati oleh generasi penerus bangsa dari mulai anak-anak sampai remaja dengan pendidikan yang tidak terbatas oleh waktu sebagaimana lembaga pendidikan lainnya, pesantren akan menciptakan kader yang terbaik secara turun temurun dalam jangka panjang. *Kedua*, pesantren mencoba memberikan keseimbangan antara

pemenuhan lahir dan batin. *Ketiga*, paparan Nur Cholis Madjid (Cak Nur) yang memberikan contoh masyarakat yang terkena dislokasi, yaitu kaum marginal atau pinggiran dikota-kota besar, seharusnya menyadarkan pesantren. (Edy Supriyono, 2003:62-63).

Dalam islam, perempuan adalah makhluk yang diciptakan dengan tanggung jawab yang berbeda dengan laki-laki. *Pertama* pandangan bahwa laki-laki lebih dominan daripada perempuan sudah ada sejak jaman dahulu, masyarakat secara umum (khususnya dalam budaya patriarki) memberikan penilaian bahwa laki-laki lebih berhak memegang tanggung jawab yang lebih besar dibanding perempuan. Secara umum, perempuan jaman dahulu kurang dilibatkan dalam hal-hal sosial dan politik dimasyarakat, proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dirancang dan dilakukan oleh kaum lelaki, kaum perempuan terlibat dalam hal yang lain, karena itu pandangan laki-laki lebih dominan dibanding perempuan terbukti dari sana (dalam hal politik). *Kedua*, dalam islam meskipun kedudukan sosial dan politik maupun lainnya antara perempuan dan laki-laki berbeda tetapi sebenarnya derajat semua manusia sama di mata Tuhan, yang membedakan adalah amal ibadahnya (taqwa).

Namun manusia adalah makhluk yang evolutif, bisa beradaptasi dengan budaya ataupun pandangan yang dianggap baru, maupun yang akan datang. Perubahan nilai dan tatanan masyarakat terus terjadi seiring perkembangan jaman, ada yang menerima perubahan itu, ada juga yang tidak, namun terlepas dari itu semua, perbincangan mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan juga mengalami perubahan kearah positif, Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam al-qur'an dan as-sunnah. "*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku*". (Q.S.

Az-Zariyat :56). Mengisyaratkan bahwa manusia (laki-laki dan perempuan) memiliki posisi yang setara dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan gender, ras, suku, etnis, budaya, yang membedakan adalah amal ibadahnya masing-masing. Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren mempunyai arti bahwa perempuan mempunyai hak untuk memberdayakan dirinya sendiri maupun orang lain, dengan memenuhi prinsip-prinsip pemberdayaan tetapi dengan batas-batas tertentu dalam agama yang tidak bisa dilanggar, batas antara dia dengan Tuhannya yang hanya dia yang tahu. Pendidikan informal keagamaan yang didapat dari pesantren bisa dijadikan pijakan untuk kaum perempuan melangkah menapaki karirnya tanpa takut melanggar batas agama dan negara.

3. Konsep Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan masyarakat mempunyai jangkauan yang umum dan luas, terdapat banyak macam pemberdayaan yang bisa dilakukan kepada sasarannya dalam hal ini masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat dikaitkan dengan pembangunan politik disuatu daerah, karena keduanya saling berkaitan, karena secara umum, pemberdayaan masyarakat mengacu kepada terbentuknya kesejahteraan ekonomi dalam suatu ekosistem sosial, yang nantinya akan menunjang kesadaran dalam individu sehingga terjadinya pembangunan politik dengan sendirinya, maka dari itu, pemberdayaan politik juga merupakan upaya memberdayakan masyarakat.

Menurut Kartono (2009), Pendidikan Politik bisa disebut juga *political forming* atau *bildung*. *Forming* merupakan intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status/kedudukan politiknya ditengah masyarakat. Sedangkan *Bildung* adalah membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggungjawab sendiri untuk

menjadi insan politik. Tujuannya agar setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Pembangunan politik tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran penting para pelaku kebijakan publik dalam hal ini pemerintah khususnya di Indonesia, untuk menunjang pemberdayaan masyarakat, supaya dengan adanya peran ini bisa menjadi percepatan terjadinya perubahan sosial kearah lebih baik. Indonesia sendiri tentu masih sedang berproses dalam sistem kenegaraanya dan sistem sosialnya. Reformasi politik tahun 1998 menjadi bukti bahwa Indonesia sedang mengalami pendewasaan demokrasi, diikuti kejadian-kejadian setelahnya.

Pemberdayaan masyarakat telah berkembang diberbagai literatur dan pemikiran para elite, walaupun memang dalam kenyataanya belum maksimal secara implementasinya. Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan pembangunan masyarakat, dimana pembangunan masyarakat akan tentu saja membutuhkan *sustainable development* yang tentunya akan didapat apabila pemberdayaan masyarakat dilakukan atau masyarakat sudah berdaya. Pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan yang berakar kerakyatan adalah sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih mengalami keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dll.

Pada intinya, konsep pemberdayaan politik ini merupakan sebuah penggabungan konsep pemberdayaan, dimana gagasan utama pemberdayaan adalah masalah ekonomi yang terjadi dimasyarakat yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat itu sendiri dan berujung terhadap pembangunan masyarakat madani, namun itu semua tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun

daerah, supaya pelaksanaan seluruh pemberdayaan ini bisa ditunjang dengan kebijakan-kebijakan politik. Masyarakat diberdayakan secara politik, melalui pendidikan-pendidikan politik, diskusi publik, literatur politik, sehingga garis finish atau *output* yang dihasilkan adalah terbentuknya masyarakat yang sejahtera secara ekonomi dan tentu saja secara politik.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Kajian Masalah	Teori yang Digunakan	Peneliti
Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren dan <i>Social Entrepreneurship</i>	Menjelaskan tentang peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan basis pesantren dan kewirausahaan. Secara spesifik menjelaskan tentang <i>Catering Ummahat pondok Pesantren Modern As Salam Surakarta</i> .	Konsep Pemberdayaan Perempuan serta <i>Social Entrepreneurship</i>	Arian Agung Prasetiyawan dan Asep Maulana Rohimat
Pemikiran Islam Terhadap Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Studi Pemikiran dan Model Pemberdayaan Nyai	Menjelaskan tentang pentingnya gender dan perlakuan kesetaraan terhadap perempuan yang dilakukan oleh para Nyai (sebutan bagi istri Kyai di	Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Siti Mahmudah Noorhayati

di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton	Pondok Pesantren) khususnya di Ponpes Nurul Jadid.		
Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan Desa Wisata Melalui Pendidikan Berbasis Komunitas	Menjelaskan tentang pengimplementasian model pemberdayaan perempuan desa wisata melalui pendidikan berbasis komunitas dari awal sampai terdapat hasilnya melalui tahapan-tahapan dengan tujuan terwujudnya perempuan yang berdaya.	Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Berbasis komunitas	Sujarwo, Trisanti, dan Fitra Ummaya Santi
Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Kemajuan Pembangunan Daerah	Penelitian ini berfokus kepada perspektif kesetaraan gender terhadap kemajuan pembangunan daerah melalui PKK di kecamatan Tomoni Kabupaten Lawu Timur	Penelitian ini menggunakan konsep kesetaraan gender dan konsep pembangunan sumberdaya manusia	Elsa Purwaningsih

C. Kerangka Pemikiran

Pembangunan masyarakat tidak bisa hanya dilakukan oleh elit politik saja, karena permasalahannya begitu kompleks, butuh elemen-elemen lain dalam masyarakat untuk membantu mempercepat pertumbuhan masyarakat baik secara sosial, ekonomi dan lainnya yang berujung kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Negara sebagai fasilitator hanya menyediakan media atau aturan sebagai dasar hukum yang wajib dipatuhi, sisanya masyarakat yang bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan mereka sendiri. Dalam hal ini *IBU BELLA* adalah selaku katalis atau bisa disebut salahsatu pemercepat pembangunan masyarakat yang ada di lingkungan Pondok Pesantren TQN Suryalaya, khususnya bagi akhwat atau kaum perempuan.

IBU BELLA merupakan sebuah organisasi perempuan berbasis pesantren yang berfokus untuk menaungi perempuan di Ponpes TQN Suryalaya. Dalam era industri 4.0 ini, peran perempuan tidak lagi hanya sebagai pendamping laki-laki dalam segala hal, justru perempuan ini sangat bisa meraih kesuksesannya sendiri dengan berbagai cara, namun memang tidak dapat dipungkiri juga bahwa agama memberikan batasan-batasan tertentu khusus untuk perempuan dalam segala hal. *IBU BELLA* ini adalah contoh Organisasi perempuan yang berbasis pesantren, tetapi mereka memperjuangkan hak-hak dan juga memberi contoh bahwa perempuan juga bisa mempunyai karir yang panjang seperti halnya laki-laki. *IBU BELLA* memfokuskan kegiatannya dalam hal keagamaan, namun juga tidak terlepas dari isu-isu sosial. Dengan berdiri berdampingan bersama masyarakat, organisasi massa lebih mudah untuk melakukan pendekatan, *sharing*,

mobilisasi, penyuluhan, pemberdayaan dan lainnya, dengan tujuan akhirnya membangun masyarakat yang sejahtera, membangun keluarga yang bahagia, baik didunia maupun di akhirat.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

